

PENGARUH SKEPTISME PROFESIONAL, KEPATUHAN PADA
KODE ETIK DAN INDEPENDENSI TERHADAP KUALITAS
AUDIT

(Studi Empiris pada BPKP perwakilan Sumatera Utara)

Artikel



Oleh:

RAHMATIKA ANANDA

2008/05236

AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2014

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENGARUH SKEPTISME PROFESIONAL, KEPATUHAN PADA
KODE ETIK DAN INDEPENDENSI TERHADAP KUALITAS AUDIT
(Studi Empiris pada BPKP perwakilan Sumatera Utara)**

Oleh:

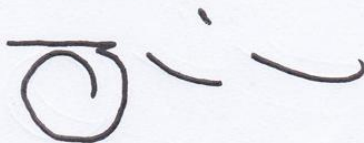
Rahmatika Ananda
05326/2008

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi untuk persyaratan wisuda periode
September 2014 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing

Padang, Agustus 2014

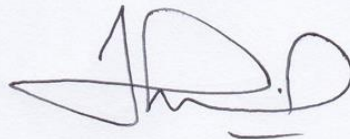
Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, CA, Ak
NIP. 19580519 199001 1 001

Pembimbing II



Henri Agustin, SE, M.Sc
NIP. 19771123 200312 1 003

**Pengaruh Skeptisme Profesional, Kepatuhan pada Kode Etik dan Independensi
terhadap Kualitas Audit
(Studi Empiris pada BPKP perwakilan Sumatera Utara)**

Rahmatika Ananda

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang
Email : rahmatika.ananda@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji: 1) pengaruh skeptisme profesional terhadap kualitas audit 2) pengaruh kepatuhan pada kode etik terhadap kualitas audit 3) pengaruh independensi terhadap kualitas audit. Populasi pada penelitian ini adalah auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sumatera Utara. Sampel penelitian ini ditentukan berdasarkan metode simple random sampling, sebanyak 100 auditor di Badan Pengawasan dan Pembangunan Perwakilan Sumatera Utara. Berdasarkan hasil analisis berganda dengan tingkat signifikan 0,05 maka hasil penelitian ini menyimpulkan: 1) skeptisme profesional berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit (H1 diterima) 2) kepatuhan pada kode etik berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit (H2 diterima) 3) independensi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit (H3 diterima). Dalam penelitian ini disarankan: 1) untuk meningkatkan pelaksanaan pengendalian intern pemerintah dengan meningkatkan kualitas auditor dalam melaksanakan proses audit 2) kepada penelitian selanjutnya untuk tidak meneliti lagi variabel ini dan dapat meneliti variabel-variabel lain yang berpengaruh lebih kuat terhadap kualitas audit 3) penelitian selanjutnya apabila menggunakan metode yang sama yaitu metode survei hendaknya dapat dilakukan juga beserta metode wawancara secara langsung terhadap auditor yang mengisi kuesioner guna mempertajam data yang ada.

Kata kunci: Skeptisme profesional, kepatuhan pada kode etik, independensi, kualitas audit.

Abstract

This study aimed to examine: 1) the effect of professional skepticism to audit quality 2) the effect of compliance to the code of ethics on audit quality 3) the effect of independence on audit quality. The population in this study was the auditors at Development and Finance Controller of North Sumatra. The research sample was determined by simple random sampling method, a total of 100 auditors in the Development and Finance Controller of North Sumatra. Based on the results of multiple analyzes with a significant level of 0.05, the results of this study concluded: 1) professional skepticism gave the positive significant effect on audit quality (H1 accepted) 2) compliance to the code of ethics gave positive significant effect on audit quality (H2 accepted) 3) independence gave significant positive effect on audit quality (H3 accepted). From this study, it is suggested: 1) to increase the government's internal control implementation to improve the quality of auditors in performing the audit process 2) for the next research to examine no longer on these variables but other variables which affect more strongly on audit quality 3) for the next research when uses the same method with this research method should be able to do well along with interviews directly to the auditor who fills out questionnaires in order to sharpen the existing data.

Keywords: professional skepticism, compliance to the code of ethics, independence, audit quality.

1. PENDAHULUAN

Pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar dalam pengelolaan suatu negara. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu pengawasan yang cukup andal dalam pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk penyelenggaraan pemerintah. Dengan adanya suatu pengawasan yang cukup andal, diharapkan dapat menjamin pendistribusian dana yang merata pada semua sektor publik sehingga efektivitas dan efisiensi penggunaan dana bisa dipertanggungjawabkan.

Fungsi auditor sebagai pihak ketiga yang independen dimaksud untuk mengurai teori keagenan (*agency theory*). Teori keagenan muncul karena adanya hubungan keagenan antara manajemen dan pemilik. Jensen dan Mecklin dalam Norma (2012), mengungkapkan bahwa dalam hubungan keagenan terjadi kontrak antara prinsipal (pemilik) dan agen (manajer). Kontrak tersebut menunjukkan bahwa agen harus bekerja demi kepentingan pemilik. Pemilik mendelegasikan wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan bisnis yang disesuaikan dengan kepentingan pemilik. Proses audit dirancang untuk menentukan apakah angka-angka yang dilaporkan dalam laporan keuangan menyajikan hasil operasi perusahaan dan posisi keuangan dengan cara-cara yang adil. Karena itu, perbaikan atas kualitas audit menjadi hal yang penting dan utama untuk menjamin akurasi dari pemeriksaan laporan keuangan. Kualitas audit sangat berperan penting dalam perkembangan dunia bisnis dan perekonomian di Indonesia.

Pengelolaan keuangan pemerintah yang baik harus didukung audit sektor publik yang berkualitas, karena jika kualitas audit sektor publik rendah, akan memberikan kelonggaran terhadap lembaga pemerintah untuk melakukan penyimpangan anggaran. Selain itu juga mengakibatkan risiko tuntutan hukum terhadap aparatur pemerintah yang melaksanakannya. Dalam beberapa tahun terakhir, permasalahan hukum terutama

berkaitan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan segala prakteknya seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar pemberian imbalan serta penggunaan uang Negara untuk kepentingan pribadi telah menjadi perhatian masyarakat dan dianggap sebagai suatu hal yang lazim terjadi dinegara ini.

Tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menghendaki adanya pelaksanaan fungsi pengawasan dan sistem pengendalian intern yang baik atas pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan Negara untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta untuk menjamin tujuan tercapai secara hemat, efisien, dan efektif.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah, pelaksanaan pengendalian intern dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jendral, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kota.

Dengan reposisi dan redefinisi tugas, fungsi, dan peran BPKP yang disesuaikan dengan perkembangan pemerintahan, keberadaan BPKP sebagai internal auditor pemerintah yang independen terhadap jajaran organisasi pemerintahan diyakini akan memberikan nilai tambah bagi seluruh stakeholders / pihak-pihak yang berkepentingan (BPKP,2008).

Dalam pelaksanaannya, BPKP memiliki dasar hukum yaitu pasal 52, 53, dan 54 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 103/2001 mengatur tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan

keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam menjalankan tugasnya tentu harus memperhatikan kode etik dan standar audit. Kharismatutu (2012) dalam Ayu (2013) menyatakan bahwa “kualitas audit merupakan suatu *issue* yang kompleks, karena begitu banyak faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit, yang tergantung dari sudut pandang masing-masing pihak”. Hal tersebut menjadikan kualitas audit sulit pengukurannya, sehingga menjadi suatu hal yang sensitif bagi perilaku individual yang melakukan audit. Secara teoritis kualitas pekerjaan auditor biasanya dihubungkan dengan kualifikasi keahlian, ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, kecukupan bukti pemeriksaan yang kompeten pada biaya yang paling rendah serta sikap independensinya dengan klien. De angelo dalam Ayu (2013) mendefinisikan “kualitas audit sebagai probabilitas seorang auditor dapat menemukan dan melaporkan penyelawasan dalam sistem akuntansi klien”.

Penting bagi auditor untuk menjaga kualitas audit supaya tidak menyesatkan para pemakainya dalam mengambil keputusan. Kualitas audit adalah terjaminnya kredibilitas dan keandalan informasi yang tersaji dalam laporan audit karena kepatuhan auditor pada standar audit yang berlaku selama penugasan audit. Unsur-unsur kualitas laporan audit yaitu tepat waktu, lengkap, akurat, obyektif, meyakinkan, jelas dan ringkas (BPK-RI, 2007).

Berdasarkan Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.Per/05/M.Pan/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dinyatakan dalam standar umum audit kinerja dan audit investigasi meliputi standar-standar yang terkait dengan karakteristik organisasi dan individu-

individu yang melakukan kegiatan audit harus independen, obyektif, memiliki keahlian (latar belakang pendidikan, kompetensi teknis dan sertifikasi jabatan dan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan), kecermatan profesional dan kepatuhan terhadap kode etik.

Seorang auditor yang memiliki sikap skeptisme profesional tidak akan menerima begitu saja penjelasan dari klien, tetapi akan mengajukan pertanyaan untuk memperoleh alasan, bukti dan konfirmasi mengenai proyek yang dipemalihkan. Jika auditor selalu menjaga profesionalismenya selama penugasan audit maka kualitas audit akan dapat terjamin.

Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP, 2012) menyatakan skeptisme profesional auditor sebagai suatu sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tanggal 30 Mei 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah dalam ketentuan pasal 1 point 2 menyebutkan kode etik Pejabat Pengawas Pemerintah adalah seperangkat prinsip moral atau nilai yang dipergunakan oleh pejabat pengawas pemerintah sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana yang menyatakan bahwa kepatuhan terhadap kode etik merupakan salah satu standar umum audit. Kode etik mengikat semua anggota profesi perlu ditetapkan bersama. Tanpa kode etik, maka setiap individu dalam satu komunitas akan memiliki tingkah laku berbeda-beda yang dinilai baik menurut anggapannya dalam berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Oleh karena itu nilai etika atau kode etik diperlukan oleh masyarakat, organisasi, bahkan Negara agar semua berjalan dengan tertib, lancar, teratur dan terukur.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tanggal 30 Mei 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah menyebutkan bahwa dalam semua hal yang berkaitan dengan audit, APIP harus independensi dan para auditornya harus obyektif dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam standar ini, bahwa independensi APIP serta obyektivitas auditor diperlukan agar kredibilitas hasil pekerjaan APIP meningkat.

Independensi merupakan suatu sikap tidak memihak. Dalam semua hal yang berkaitan dengan audit. Independensi APIP serta obyektifitas auditor diperlukan agar kredibilitas hasil pekerjaan APIP dapat maksimal.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa audit, konsultasi, asistensi, evaluasi, pemberantasan KKN konsultasi serta pendidikan dan pelatihan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor BPKP berupa dibuatnya laporan audit terhadap laporan keuangan pemerintah dalam Standar Akuntansi Negara (SAP). Untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas, maka laporan tersebut haruslah disajikan secara tepat waktu, lengkap, obyektif, menyakinkan, akurat, jelas, dan ringkas. Dengan demikian, masyarakat sebagai pengguna laporan yakin akan keandalan informasi yang disajikan guna mengambil keputusan.

Faktanya, kualitas audit yang dihasilkan auditor tengah mendapat sorotan dari masyarakat banyak. Hal ini terbukti dari sebuah kasus yang terjadi, seperti pada kasus IM2 dan Indosat dimana audit oleh BPKP dinyatakan gagal. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan gugatan mantan dirut IM2 dan Indosat, Indar Atmanto, terkait laporan audit BPKP pada tanggal 31 oktober 2012

yang menyatakan adanya kerugian Negara senilai Rp 1,3 triliun dalam pembangunan jaringan frekuensi IM2 dan Indosat dinyatakan gagal. Majelis Hakim yang diketahui oleh Heri Herianto menyatakan laporan audit BPKP tidak sah dan cacat hukum. Namun Hakim PTUN tidak mengabulkan seluruh gugatan Indar Atmanto, IM2, dan Indosat tersebut, adapun tuntutan uang paksa tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim. Maka dengan adanya penetapan PTUN tersebut maka alat bukti laporan BPKP otomatis lumpuh.

Sedangkan di daerah Sumatera Utara fenomena mengenai BPKP yaitu pada 2013, Tribunews.com memberitakan, terdapat kasus dimana BPKP melakukan pemecatan salah satu auditor BPKP, Sudirman, karena telah melanggar kode etik atau diistilahkan dengan sebutan Standar Operational Prosedur (SOP) diinstitusi BPKP. Atas perbuatannya, Sudirman telah melanggar PP 53/2010. Masalah lainnya yaitu dimana hasil audit di BPKP Sumatera utara lambandan tak jua mampu menuntaskan beberapa kasus korupsi yang ada. Mandeknya penuntasan kasus-kasus ini salah satunya dikarenakan hasil audit investigasi BPKP yang belum juga keluar. Padahal hasil audit ini merupakan langkah kuat bagi kejaksanaan untuk menuntaskan kasus-kasus yang ada tersebut.

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Sejauhmana pengaruh skeptisme profesional terhadap kualitas audit ?
2. Sejauhmana pengaruh kepatuhan terhadap kode etik terhadap kualitas audit?
3. Sejauhmana pengaruh independensi terhadap kualitas audit?

2. TELAHAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Kualitas audit

Kualitas audit menurut De angelo dalam Ayu (2013) merupakan sebagai probabilitas seorang auditor dapat menemukan dan melaporkan penyelewengan dalam sistem akuntansi klien”.

Kualitas audit tidak dapat dipisahkan dari teori keagenan (*agency theory*). Teori keagenan merupakan bagian dari akuntansi keperilakuan (*behavioral accounting*) yang merupakan cabang akuntansi yang mempelajari hubungan antara perilaku manusia dengan sistem akuntansi. Ruang lingkup dibidang akuntansi keperilakuan sangat luas sekali, tidak hanya meliputi bidang akuntansi manajemen saja, tetapi juga menyangkut penelitian dalam bidang etika, auditing (pemeriksaan akuntan), sistem informasi akuntansi bahkan juga akuntansi keuangan. Teori keagenan membahas tentang adanya hubungan keagenan antara prinsipal dan agen dalam Norma (2012). Hubungan keagenan ini menimbulkan kontrak antara prinsipal dengan agen. Akan tetapi, Kepentingan dua pihak ini tidak selalu sejalan sehingga muncul benturan-benturan kepentingan antara keduanya apabila kedua pihak berusaha memaksimalkan utilitasnya masing-masing. Ada kemungkinan agen menyalahgunakan kepercayaan dari pemilik untuk mengambil keuntungan pribadi (*Moral hazard*).

Agency problem adalah benturan kepentingan yang potensial antara prinsipal dengan agen. Dan adanya permasalahan keagenan merupakan penyebab munculnya *agency cost*. *Agency cost* adalah biaya yang muncul akibat adanya permasalahan keagenan. Oleh karena itu, aktivitas audit dibutuhkan untuk mengurai *agency cost* tersebut.

Teori keagenan yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling dalam Norma (2012) mencoba menjelaskan adanya konflik kepentingan

antara manajemen selaku agen dan pemilik serta entitas lain dalam kontrak (misal kreditur) selaku prinsipal. Prinsipal ingin mengetahui segala informasi termasuk aktifitas manajemen, yang terkait dengan investasi atau dananya dalam perusahaan. Hal ini dilakukan dengan meminta laporan pertanggungjawaban dari agen (manajemen). Berdasarkan laporan tersebut, prinsipal dapat menilai kinerja manajemen. Namun yang sering kali terjadi adalah kecenderungan manajemen untuk melakukan tindakan yang membuat laporannya kelihatan baik, sehingga kinerjanya dianggap baik. Untuk mengurangi atau meminimalkan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dan dapat membuat laporan keuangan yang dibuat manajemen lebih dapat dipercaya, maka diperlukan pengujian dan dalam hal itu pengujian tersebut hanya dapat dilakukan oleh pihak ketiga yaitu auditor independen.

Dalam sektor publik, *Government Accountability Office* (GOA) mendefinisikan kualitas audit sebagai ketaatan terhadap standar profesi dan ikatan kontrak selama melaksanakan audit. Standar audit menjadi bimbingan dan ukuran kualitas audit yang dilakukan oleh auditor pemerintah itu sendiri. Dalam hal pemeriksaan keuangan Negara yang dilakukan oleh auditor BPKP, berdasarkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.Per/05/M.Pan/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dinyatakan dalam standar umum audit kinerja dan audit investigasi meliputi standar-standar yang terkait dengan karakteristik organisasi dan individu-individu yang melakukan kegiatan audit harus independen, obyektif, memiliki keahlian (latar belakang pendidikan, kompetensi teknis dan sertifikasi jabatan dan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan), kecermatan profesional dan kepatuhan terhadap kode etik. Dengan demikian, semua standar tersebut

merupakan standar yang menentukan kualitas audit yang di hasilkan auditor.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit menurut penelitian yang dilakukan oleh Dalam simposium nasional akuntansi XIII di Purwokerto (2010) penelitian yang dilakukan oleh Havidz Mabruri dan Jaka Winarna tentang Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit di Lingkungan Pemerintah Daerah, terbukti bahwa skeptisme profesional, kepatuhan terhadap kode etik, dan independensi merupakan termasuk faktor yang mempengaruhi kualitas audit.

Pentingnya bagi auditor untuk menjaga kualitas auditnya supaya tidak menyesatkan para pemakainya dalam mengambil keputusan. Kualitas laporan audit adalah terjaminnya kredibilitas dan keandalan informasi yang tersaji dalam laporan audit karena kepatuhan auditor pada standar audit yang berlaku selama penugasan audit. Kredibilitas sangat diperlukan oleh semua organisasi pemeriksaan yang melaksanakan pemeriksaan yang di andalkan oleh para pejabat entitas dan pengguna hasil pemriksaan lainnya dalam mengambil keputusan, dan merupakan hal yang diharapkan oleh publik dari informasi yang disajikan oleh pemeriksaan (BPK-RI,2007).

Unsur-unsur kualitas audit

Berdasarkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.Per/05/M.Pan/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dinyatakan, terdapat tujuh unsur kualitas hasil audit diantaranya:

- a. Tepat waktu
- b. Lengkap
- c. Akurat
- d. Objektif
- e. meyakinkan
- f. Jelas
- g. Ringkas

Laporan audit yang ringkas dengan penyajian yang tidak lebih panjang dari yang diperlukan dapat meningkatkan kualitas laporan tersebut. Laporan yang terlalu rinci dapat menurunkan kualitas laporan, bahkan dapat menyembunyikan pesan yang sesungguhnya dan dapat membingungkan atau mengurai minat pembaca.

Dimensi Kualitas Audit

Dimensi kualitas audit menurut De anglo (1981) dalam Miharni Haviz (2011), mendefinisikan kualitas dalam dua dimensi. Pertama, auditor harus mampu mendeteksi salah saji material. Kedua, salah saji material tersebut harus dilaporkan. Ada beberapa dimensi kualitas audit menurut para peneliti akuntansi:

- a. Faktor related to detection
- b. Audit firm factor
- c. Factor related to reprotng

Upaya menjaga kualitas audit

Untuk menjaga kualitas audit, profesi akuntan telah mengembangkan tingkatan rangka aturan yang terdiri dari:

1. Pembentuk standar adalah sektor swasta yang menetapkan standar akuntansi, standar auditing, kode etik, dan pengendalian kualitas.
2. Aturan kantor akuntan adalah aturan yang diterapkan di dalam kantor akuntan yang berupa aturan dan prosedur untuk menjamin para akuntannya berpraktik sesuai dengan standar profesional.

Mengukur kualitas audit merupakan hal yang agak sulit dilakukan. Karena untuk melihat seseorang itu berkualitas atau tidaknya kita harus melihat hasil kerjanya terlebih dahulu. Karena auditor yang berkualitas tinggi

akan mencegah terjadinya kekeliruan dalam laporan keuangan yang di auditnya.

Skeptisme Profesional

Skeptisme berasal dari kata skeptic, dalam kamus besar bahasa Indonesia (pusat bahasa, 2008) berarti sikap meragukan, mencurigai, dan tidak mempercayai kebenaran suatu hal, teori, ataupun pernyataan. Skeptisme profesional auditor adalah suatu sikap dalam melakukan penugasan audit. Dalam buku istilah akuntansi dan auditing, skeptisme berarti bersikap ragu-ragu terhadap pernyataan-pernyataan yang belum cukup kuat dasar-dasar pembuktiannya (islahuzzaman, 2012).

Sedangkan profesional, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (pusat bahasa, 2008) adalah sesuatu yang bersangkutan dengan profesi, yang membutuhkan keahlian khusus untuk menerapkannya. Kata profesional dalam skeptisme profesional merujuk pada fakta bahwa auditor telah dan terus dididik dan dilatih untuk menerapkan keahliannya dalam mengambil keputusan sesuai standar keahliannya dalam mengambil keputusan sesuai standar profesionalnya. namun dari definisi kata skeptisme dan profesional tersebut, dapat disimpulkan bahwa skeptisme profesional auditor adalah sikap auditor yang selalu meragukan dan mempertanyakan segala sesuatu, dan menilai secara kritis bukti audit serta mengambil keputusan audit berlandaskan keahlian auditing yang dimilikinya. Skeptisme bukan berarti tidak percaya, tapi mencari pembuktian sebelum dapat mempercayai suatu pernyataan (*center for audit quality*, 2010).

Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP, 2012) menyatakan skeptisisme profesional auditor sebagai suatu sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit. Skeptisme profesional digabungkan ke

dalam literature profesional yang membutuhkan auditor untuk mengevaluasi kemungkinan kecurangan material. Selain itu juga dapat di artikan sebagai pilihan untuk memenuhi tugas audit profesionalnya untuk mencegah dan mengurangi konsekuensi bahaya dan perilaku orang lain. Skeptisme profesional auditor dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain independensi dan etika. Etika lebih luas dari prinsip-prinsip moral. Etika tersebut mencakup prinsip perilaku untuk orang-orang professional yang dirancang baik untuk tujuan praktis maupun tujuan idealistis.

Dalam filsafat, skeptisme lebih bermakna khusus untuk suatu atau dari beberapa sudut pandang. Termasuk sudut pandang tentang:

1. Sebuah pertanyaan,
2. Metode mendapatkan pengetahuan melalui keraguan sistematis dan terus menerus pengujian,
3. Kesembarangan, relativitas, atau subyektivitas dari nilai-nilai moral,
4. Keterbatasan pengetahuan,
5. Metode intelektual kehati-hatian dan pertimbangan yang ditangguhkan.

Skeptis juga bisa dianggap sebagai sifat. Orang skeptis bisa memberikan argumen-argumenkeberatan terhadap sesuatu hal. Mereka meminta bukti, menyodorkan fakta kenapa cerita itu tak mungkin dan lain sebagainya. Dengan kata lain, Sifat skeptis artinya sifat meragukan sesuatu sesuatu sebelum menemukan bukti bahwa sesuatu tersebut tidak perlu diragukan, tidak mau menerimadengan mudah apa adanya. Selalu meragukan sesuatu jika belum ada buktiyangbenar-benarjelas. Jikaada cerita maka tidak langsung mempercayainya.

Pengalaman seorang auditor juga menjadi salah satu faktor yang

mempengaruhi skeptisme seorang auditor. Pengalaman yang dimaksud disini adalah pengalaman auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu, maupun banyaknya penugasan yang pernah dilakukan. Semakin banyak seorang auditor melakukan pemeriksaan laporan keuangan, maka semakin tinggi tingkat skeptisme yang dimiliki.

Auditor dituntut untuk melaksanakan skeptisme profesionalnya sehingga auditor dapat menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama, karena kemahiran profesional seorang auditor mempengaruhi ketepatan opini yang diberikannya. Dalam *Internasional Standar Auditing* (IAASB, 2009) juga ditekankan pentingnya skeptisme profesional. Disebutkan bahwa auditor harus merencanakan dan melaksanakan proses berlandaskan skeptisme profesional dengan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan material dalam laporan keuangan. Pekerjaan auditor selalu berhubungan dengan pembuktian dan pencarian kebenaran bukti-bukti dari dokumen dan kertas kerja, dan dari prosedur standar yang mereka anut, namun hal ini bukan berarti auditor hanya bekerja untuk memenuhi prosedur standar yang ada, terutama saat ditemukannya bukti-bukti yang penting.

Karakteristik skeptisme profesional

Hurt (2003) mengembangkan sebuah model skeptisme profesional dan memetakan karakteristik yang dimiliki seseorang yang memiliki skeptisme profesional.

Karakteristik tersebut terdiri dari enam, yakni:

1. Pola pikir yang selalu bertanya-tanya (*questioning mind*)
2. Penundaan pengambilan keputusan (*suspension of judgment*)

3. Mencari pengetahuan (*search for knowledge*)
4. Kemampuan pemahaman interpersonal (*interpersonal understanding*)
5. Percaya diri (*self-confidence*)
6. Determinasi diri (*self-determination*).

Faktor yang mempengaruhi skeptisme profesional

Kee dan Knox's dalam Subhan (2011), menyatakan bahwa skeptisme profesional auditor dipengaruhi oleh beberapa faktor:

1. Faktor-faktor kecondongan etika
2. Faktor-faktor situasi
3. Pengalaman

Sebagai karakteristik individual, skeptisme dapat berbentuk bawaan (*trait*), yakni aspek yang stabil dan bertahan lama dalam diri seorang individu dan juga situasional (*state*), yakni kondisi sementara yang dipengaruhi oleh situasi (hurt,2010). Dalam kerangka skeptisme profesionalnya, skeptisme bawaan dan skeptisme situasional akan membentuk pola pikir skeptis dan pola pikir skeptis akan membentuk tindakan skeptis. Kecenderungan bentuk skeptisme yang dimiliki auditor menentukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat skeptismenya.

Dalam prakteknya, auditor juga seringkali diwarnai secara psikologis yang kadang terlalu curiga atau sebaliknya terkadang terlalu percaya terhadap asersi yang ada. Padahal seharusnya auditor secara profesional menggunakan kecakapannya untuk *balance* antara sikap curiga dan sikap percaya tersebut. Ini yang kadang sulit diharapkan, apalagi pengaruh-pengaruh di luar diri auditor yang bisa mengurangi sikap skeptisme profesional tersebut. Untuk mengukurnya adalah digunakan indikator tingkat keraguan

auditor terhadap bukti audit, banyaknya pemeriksaan tambahan, dan konfirmasi langsung.

Kepatuhan pada Kode Etik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tanggal 30 Mei 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah dalam ketentuan pasal 1 point 2 menyebutkan kode etik Pejabat Pengawas Pemerintah adalah seperangkat prinsip moral atau nilai yang dipergunakan oleh pejabat pengawas pemerintah sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Kode etik pada prinsipnya merupakan sistem dari prinsip-prinsip moral yang diberlakukan dalam suatu kelompok profesi yang ditetapkan secara bersama. Kode etik suatu profesi merupakan ketentuan perilaku yang harus dipatuhi oleh setiap mereka yang menjalankan tugas profesi. Disamping itu, hasil kerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diharapkan bermanfaat bagi pimpinan dan unit-unit kerja serta pengguna lainnya untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Hasil kerja ini akan dapat digunakan dengan penuh keyakinan jika pemakai jasa mengetahui dan mengakui tingkat profesionalisme auditor yang bersangkutan. Untuk itu disyaratkan diberlakukan dan dipatuhinya aturan perilaku yang menuntut disiplin dari auditor APIP yang melebihi tuntutan peraturan perundangundangan berupa Kode Etik yang mengatur nilai-nilai dasar dan pedoman perilaku, yang dalam pelaksanaannya memerlukan pertimbangan yang seksama dari masing-masing auditor.

Kode etik mengikat semua anggota profesi perlu ditetapkan bersama. Tanpa kode etik, maka setiap individu dalam satu komunitas akan memiliki tingkah laku yang berbeda-beda yang dinilai baik menurut anggapannya dalam berinteraksi

dengan masyarakat lainnya. Oleh karena itu nilai etika atau kode etik diperlukan oleh masyarakat, organisasi, bahkan negara agar semua berjalan dengan tertib, lancar, teratur dan terukur.

Kepercayaan masyarakat dan pemerintah atas hasil kerja auditor ditentukan oleh keahlian, independensi serta integritas moral/kejujuran para auditor dalam menjalankan pekerjaannya. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap satu atau beberapa auditor dapat merendahkan martabat profesi auditor secara keseluruhan, sehingga dapat merugikan auditor lainnya.

Oleh karena itu organisasi auditor berkepentingan untuk mempunyai kode etik yang dibuat sebagai prinsip moral atau aturan perilaku yang mengatur hubungan antara auditor dengan auditan, antara auditor dengan auditor dan antara auditor dengan masyarakat. Kode etik atau aturan perilaku dibuat untuk dipedomani dalam berperilaku atau melaksanakan penugasan sehingga menumbuhkan kepercayaan dan memelihara citra organisasi di mata masyarakat (BPKP, 2008).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tanggal 30 Mei 2008 menjelaskan bahwa maksud ditetapkannya Kode Etik APIP adalah tersedianya pedoman perilaku bagi auditor dalam menjalankan profesinya dan bagi atasan auditor APIP dalam mengevaluasi perilaku auditor APIP, Dengan Tujuan adalah:

1. Mendorong sebuah budaya etis dalam profesi APIP
2. Memastikan bahwa seorang profesional akan bertingkah laku pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan PNS lainnya
3. Mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis

Kode Etik APIP ini diberlakukan bagi auditor dan PNS/petugas yang diberi tugas oleh APIP untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindak lanjutnya.

Prinsip-prinsip perilaku auditor

Prinsip-prinsip perilaku auditor adalah:

1. Integritas
2. Obyektivitas
3. Kerahasiaan
4. Kompetensi

Pelanggaran terhadap kode etik

1. Tindakan yang tidak sesuai dengan Kode Etik tidak dapat diberi toleransi meskipun dengan alasan tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan organisasi, atau diperintahkan oleh pejabat yang lebih tinggi.
2. Auditor tidak diperbolehkan untuk melakukan atau memaksa karyawan lain melakukan tindakan melawan hukum atau tidak etis.
3. Pimpinan APIP harus melaporkan pelanggaran Kode Etik oleh auditor kepada pimpinan organisasi.
4. Pemeriksaan, investigasi dan pelaporan pelanggaran Kode Etik ditangani oleh Badan Kehormatan Profesi, yang terdiri dari pimpinan APIP dengan anggota yang berjumlah ganjil dan disesuaikan dengan kebutuhan Anggota Badan Kehormatan.

Kelangsungan hidup profesi auditor di Indonesia sangat bergantung kepada kepercayaan masyarakat terutama para pengguna jasa auditor terhadap kualitas jasa yang dihasilkan profesi. Apabila para pemakai jasa auditor tidak memiliki kepercayaan terhadap profesi auditor, maka pelayanan jasa profesi tersebut.

Independensi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tanggal 30 Mei 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah menyebutkan bahwa dalam semua hal yang berkaitan dengan audit, APIP harus independensi dan para auditornya harus obyektif dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam standar ini, bahwa independensi APIP serta obyektivitas auditor diperlukan agar kredibilitas hasil pekerjaan APIP meningkat. Penilaian independensi dan obyektivitas mencakup dua komponen berikut, yaitu (1) status APIP dalam organisasi dan (2) kebijakan untuk menjaga obyektivitas auditor terhadap objek audit.

Mulyadi (2002:26) mengatakan bahwa independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya pertimbangan yang obyektif dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Independensi merupakan suatu sikap tidak memihak. Dalam semua hal yang berkaitan dengan audit, APIP harus independen dan para auditornya harus melaksanakan tugas dengan obyektif. Independensi APIP serta obyektifitas auditor diperlukan agar kredibilitas hasil pekerjaan APIP dapat maksimal.

Dalam kode etik akuntan disebutkan bahwa independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugasnya. Yang bertentangan dengan prinsip-prinsip integritas dan obyektivitas. Setiap auditor harus independen dari semua kepentingan yang bertentangan atau pengaruh yang tidak layak. Ia juga harus menghindari situasi yang bias menimbulkan kesan pada pihak ketiga bahwa ada pertentangan kepentingan dan keobyektifan sudah tidak dipertahankan.

Independensi merupakan salah satu komponen etika yang harus dijaga oleh akuntan publik. Independensi berarti bahwa auditor harus jujur, tidak mudah dipengaruhi dan tidak memihak kepentingan siapapun, karena ia melakukan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Auditor berkewajiban untuk jujur tidak hanya pada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan pada pekerjaan auditor tersebut. Sikap mental independen tersebut meliputi independen dalam fakta maupun independen dalam penampilan.

Menurut BPKP (2008) dikatakan bahwa independensi pada dasarnya merupakan sesuatu yang dirasakan oleh masing-masing menurut apa yang diyakini sedang berlangsung. Dengan adanya independensi yang dimiliki oleh auditor intern untuk dapat melakukan pekerjaannya secara bebas dan objektif, memungkinkan para auditor membuat pertimbangan penting secara mental dan tidak menyimpang. BPKP juga menjelaskan selain sifat independensi yang dimiliki oleh auditor, independensi organisasi juga sangat diperlukan. Status APIP dalam organisasi yang ditempatkan langsung dibawah pimpinan tertinggi instansi merupakan contoh keindepsian yang tinggi dari organisasi tersebut. Dalam praktiknya kedudukan dan status organisasi dimana APIP ditempatkan adalah kewenangan pemerintah yang dituangkan dalam suatu peraturan.

Klasifikasi Independensi

Pusdiklat BPKP (2008) menjelaskan independensi pada dasarnya merupakan sesuatu yang dirasakan oleh masing-masing menurut apa yang diyakini sedang berlangsung. sehubungan dengan hal tersebut, independensi auditor dapat ditinjau dan dievaluasi dari:

1. Independensi Praktisi
2. Independensi profesi

Setiap auditor harus memiliki kedua sikap independensi tersebut. kedua aspek independen tersebut mempunyai hubungan yang erat dan saling berkaitan satu dengan yang lain.

Independensi sangat penting bagi profesi akuntan publik karena profesi akuntan publik merupakan profesi yang mengemban kepercayaan dari masyarakat. Namun, dalam kenyataannya auditor seringkali menemui kesulitan dalam mempertahankan sikap mental independen.

Terdapat tiga aspek independensi seorang auditor menurut Abdul Halim (2001) dalam Norma (2012), yaitu sebagai berikut:

1. *Independensi in fact* (independensi senyatanya)
2. *Independensi in appearance* (independensi dalam penampilan)
3. *Independensi in competence* (independensi dari sudut keahlian)

Upaya memelihara independensi auditor

Upaya memelihara independensi auditor dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Tidak boleh berpartisipasi dalam aktivitas atau hubungan yang dapat menurunkan penilaian mereka terhadap aktivitas yang sedang di uji.
2. Tidak boleh menerima apapun yang dapat menurunkan atau dianggap menurunkan kepentingan profesional mereka.
3. harus menungkapkan semua fakta yang diketahui jika tidak diungkapkan harus mendistorsi laporan yang mereka telah berikan.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang membahas mengenai kualitas audit, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ayu (2012). Penelitian Ayu tersebut mengenai pengaruh keahlian, independensi, dan etika terhadap kualitas audit menunjukkan bahwa independensi dan etika mempengaruhi kualitas audit.

Selanjutnya penelitian yang pernah membahas tentang kualitas audit, yaitu penelitian yang dilakukan Miharni (2011). Penelitian Miharni tersebut mengenai pengaruh Independensi, skeptisme profesional, dan bahan bukti yang kompeten terhadap kualitas audit menunjukkan bahwa independensi dan skeptisme profesional mempengaruhi kualitas audit.

Dan juga penelitian yang dilakukan oleh Subhan (2011), yaitu mengenai pengaruh kecermatan profesi, obyektifitas, independensi dan kepatuhan kepada kode etik terhadap kualitas audit menunjukkan bahwa kepatuhan pada kode etik dan independensi juga mempengaruhi kualitas audit.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang dan kajian teori diatas yang dapat dijelaskan bahwa skeptisme profesional, kepatuhan pada kode etik, dan independensi berpengaruh terhadap kualitas audit.

Kualitas audit merupakan sebagai ketaatan terhadap standar profesi dan ikatan kontrak selama melaksanakan audit.

Skeptisme profesional merupakan sikap auditor yang selalu meragukan dan mempertanyakan segala sesuatu, dan menilai secara kritis bukti audit serta mengambil keputusan audit berlandaskan keahlian auditing yang dimilikinya. Tanpa menerapkan skeptisme profesional auditor tidak akan menemukan salah saji yang diakibatkan kecurangan. Rendahnya tingkat skeptisme profesional dapat menyebabkan kegagalan dalam mendeteksi kecurangan.

Kepatuhan pada kode etik merupakan seperangkat prinsip moral atau nilai yang dipergunakan oleh pejabat pengawas pemerintah sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan. kode etik merupakan pedoman yang menjadi dasar bagi seorang berperilaku dan hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas jasa profesional seorang auditor.

Independensi merupakan sikap yang tidak memihak sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan dapat memberikan penilaian yang objektif terhadap semua hal yang terkait dalam pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan. dengan adanya sikap independen, auditor tidak akan dapat dipengaruhi oleh pihak manapun dan tidak akan memihak dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga dapat melaksanakan audit dengan baik sehingga dapat melaksanakan audit dengan baik pula.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Konseptual (lampiran)

Hipotesis

Berdasarkan latar belakang perumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya dan tujuan penelitian, maka dapat di buat beberapa hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Semakin tinggi skeptisme profesional maka akan semakin baik kualitas audit yang dihasilkan. probabilitas melakukan *tax aggressive*.

H₂ : Semakin tinggi kepatuhan pada kode etik maka akan semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan.

H₃ : Semakin tinggi independensi maka akan semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong pada penelitian kausatif. Penelitian kausatif berguna untuk menganalisis pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya (Sugiyono, 2008).

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan Sumatera Utara yang berjumlah 145 orang.

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan *simple random sampling*, yaitu populasi diberi nomor, kemudian sampel yang digunakan ditarik secara random, baik dengan menggunakan *random numbers* ataupun dengan undian biasa.

Responden dalam penelitian ini adalah auditor di BPKP perwakilan Sumatera Utara. Jumlah responden sebanyak 57 orang.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek. Data subjek merupakan jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian (responden). Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data tersebut diperoleh secara langsung dari instansi pemerintah daerah dengan menggunakan daftar pertanyaan dalam bentuk kuesioner guna mengumpulkan informasi dari objek penelitian tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data penelitian. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner. Kuesioner disebarkan langsung ke responden, demikian pula pengembaliannya dijemput sendiri sesuai dengan janji pada kantor instansi pemerintah tersebut. Responden diharapkan mengembalikan kembali kuesioner pada peneliti dalam waktu yang telah ditentukan.

Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala likert dengan lima alternatif jawaban dan masing-masing diberi skor yaitu: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu-Ragu (RR), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS).

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengukur variabel dalam rangka mengumpulkan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Variabel yang diukur dalam kuesioner mencakup: kualitas audit, skeptisme profesional, kepatuhan pada kode etik, dan independensi.

Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas pada penelitian ini menggunakan rumus korelasi *Product Moment*. jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka nomor item tersebut dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

2. Uji Reliabilitas

Setelah dilakukan pengujian validitas, selanjutnya akan dilakukan pengujian reliabilitas, yang tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, jika dilakukan pengukuran dua kali atau lebih. Instrumen dikatakan reliabel (andal) jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan *Cronbach Alpha* (α) dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 17. Sekaran (2006) menyatakan cara mengukur reliabilitas dengan *Cronbach Alpha's* dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Kurang dari 0.6 tidak reliabel
- b. 0.6-0.7 dapat diterima

- c. 0.7-0.8 baik
- d. Lebih dari 0.8 reliabel

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas residual dilakukan untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak. Sebelum dilakukan uji normalitas residual maka dilakukan uji normalitas data untuk melihat apakah data ini dapat menggunakan uji analisis parametrik atau non parametrik. Pengujian ini menggunakan metode *Kolmogrov-Smirnov* dengan kriteria pengujian $\alpha = 0,05$ (Singgih, 2001) sebagai berikut :

- a. Jika $\alpha \text{ sig} \geq \alpha$ berarti data sampel berdistribusi normal.
- b. Jika $\alpha \text{ sig} < \alpha$ berarti data sampel tidak berdistribusi normal.

2. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah uji yang bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk menguji terjadi tidaknya heterokedastisitas digunakan uji Glejser. Apabila $\text{sig.} > 0.05$ maka tidak terdapat gejala heterokedastisitas. Model yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas.

3. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah kejadian yang menginformasikan terjadinya hubungan antara variabel-variabel bebas (X) yang berarti. Singgih (2001) menyatakan bahwa deteksi adanya multikolinearitas dapat dilihat dari besaran VIF dan tolerance, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika nilai *tolerance* $< 0,1$ dan *VIF* > 10 , terjadi multikolinearitas.
- b. Jika nilai *tolerance* $> 0,1$ dan *VIF* < 10 , tidak terjadi multikolinearitas

Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif

a. Verifikasi Data

Verifikasi data yaitu memeriksa kembali kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk memastikan apakah semua pertanyaan sudah dijawab lengkap oleh responden.

b. Menghitung Nilai Jawaban

Karena penelitian ini menggunakan data primer maka nilai jawaban dihitung dengan menggunakan rumus:

Rata-Rata Skor

$$= \frac{(5 SS) + (4 S) + (3 KS) + (2 TS) + (1 STS)}{15}$$

Dimana:

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

KS = Kurang Setuju

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

Menghitung nilai rerata jawaban responden dengan menggunakan rumus:

$$\text{Mean} = \sum_{h=1}^n x_i$$

Dimana:

x_i = Skor total

n = Jumlah responden

Maka tingkat capaian responden (TCR) dihitung dengan:

$$\text{TCR} = \frac{R_s}{n} \times 100$$

Keterangan:

TCR = Tingkat capaian responden

R_s = Rata-rata skor jawaban

n = Nilai skor jawaban

Nilai persentase dimasukkan ke dalam kriteria sebagai berikut:

- a. Interval jawaban responden 76-100% kategori jawabannya baik
- b. Interval jawaban responden 56-75% kategori jawabannya cukup baik
- c. Interval jawaban responden <56% kategori jawabannya kurang baik

2. Pengujian Model

Uji model dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variable dependen.

a. Analisis regresi berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda karena variable penelitiannya lebih dari satu variable bebas. Untuk mengetahui pengaruh antara variable independen dengan variable dependen dapat menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kualitas Audit

a = Konstanta

b_{123} = Koefisien regresi dari variable independen

x_1 = Skeptisme Profesional

x_2 =Kepatuhan Pada Kode etik

x_3 = Independensi

e = Error

b. Uji F (*F-Test*)

Uji F dilakukan bertujuan untuk menguji apakah hasil analisis berganda modelnya sudahsignifikanatau tidak dan untuk dapat mengetahui pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen secara keseluruhan atau

secara simultan. Patokan yang digunakan dalam pengujian ini adalah membandingkan nilai *sig* yang diperoleh dengan derajat signifikansi pada level $\alpha = 0,05$. Apabila nilai *sig* yang diperoleh lebih kecil dari derajat signifikansi maka model yang digunakan dapat diterima atau dilanjutkan.

c. Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui kontribusi dari variabel bebas terhadap variabel terikat dilihat dari *adjusted R square*-nya, pemilihan nilai *adjusted R square* karena penelitian ini menggunakan analisis regresi dengan jumlah variabel lebih dari satu. Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. *Adjusted R²* berarti R^2 sudah disesuaikan dengan derajat bebas dari masing-masing jumlah kuadrat yang tercakup di dalam perhitungan *Adjusted R²*. Untuk membandingkan dua R^2 , maka harus memperhitungkan banyaknya variabel X yang ada dalam model. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan *adjusted R²* yaitu:

$$AdjustedR^2 = 1 - (1 - R^2) \left[\frac{N-1}{N-k} \right]$$

Dari rumus di atas jelas bahwa:

- 1) Kalau $k > 1$ maka *adjusted R²* < R^2 , yang berarti bahwa apabila banyaknya variabel bebas ditambah, *adjusted R²* dan R^2 akan sama- sama meningkat, tetapi peningkatan *adjusted R²* lebih kecil daripada R^2 .

- 2) *Adjusted R²* dapat positif atau negatif, walaupun *R²* selalu non negatif. Jika *adjusted R²* negatif nilainya dianggap 0.

3. Uji Hipotesis (*t-Test*)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan yang signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Untuk melihat nilai signifikan masing-masing parameter yang diestimasi, maka digunakan *t-Test* dengan rumus:

$$t - Test = \frac{\beta_n}{S\beta_n}$$

keterangan:

t = Nilai mutlak untuk pengujian

β_n = Koefisien regresi masing variabel

$S\beta_n$ = Standar *error* masing variabel

Dengan kriteria pengujian:

- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_a diterima.
- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_a ditolak.

Selain kriteria tersebut, untuk melihat ada tidaknya pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat dapat ditentukan dengan melihat tingkat signifikansi dan koefisien positif dengan nilai $\alpha = 0,05$. Apabila tingkat signifikansi $< 0,05$ berarti H_a diterima dan H_0 ditolak. Sebaliknya, apabila tingkat signifikansi $> 0,05$ berarti H_a ditolak dan H_0 diterima.

D. Definisi Operasional

1. Kualitas Audit

Kualitas Audit merupakan kualitas audit sebagai ketaatan terhadap standar profesi dan ikatan kontrak selama melaksanakan audit.

2. Skeptisme Profesional

Skeptisme Profesional merupakan sikap auditor yang selalu meragukan dan mempertanyakan segala sesuatu, dan menilai secara kritis bukti audit serta mengambil keputusan audit berlandaskan keahlian auditing yang dimilikinya.

3. Kepatuhan pada Kode Etik

Kepatuhan pada Kode Etik merupakan seperangkat prinsip moral atau nilai yang dipergunakan oleh pejabat pengawas pemerintah sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan.

4. Independensi

Independensi merupakan sikap yang tidak memihak sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan dapat memberikan penilaian yang objektif terhadap semua hal yang terkait dalam pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Jend. Gatot Subroto Km. 5,5 Medan. BPKP merupakan suatu lembaga pemerintah non departemen yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. BPKP melaksanakan tugas pemerintah dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan berupa audit, konsultasi, asistensi, evaluasi, pemberantasan KKN serta pendidikan dan pelatihan pengawasan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Visi BPKP perwakilan Sumatera Utara yaitu menjadi auditor presiden yang responsif, interaktif, dan terpercaya, mewujudkan akuntabilitas keuangan

negara yang berkualitas diwilayah Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan misi BPKP perwakilan Sumatera Utara adalah Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas KKN di Wilayah Provinsi Sumatera Utara, membina secara efektif penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Wilayah Provinsi Sumatera Utara, mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di Wilayah Provinsi Sumatera Utara, dan menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang handal bagi Presiden/Pemerintah di Wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Jumlah populasi sasaran atau sampel pada penelitian ini adalah tiga puluh sembilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Agam yang terdiri dari dinas, kantor, badan, dan inspektorat daerah. Setiap sampel masing-masing terdiri dari tiga responden. Dari tiga puluh sembilan sampel tersebut, disebarkan sebanyak 117 kuesioner. Hingga batas akhir pengumpulan data, kuesioner yang diterima kembali sebanyak 99 kuesioner. Hanya 74.36% di-antaranya yang mengembalikan dan meng-isi kuesioner dengan lengkap. Kuesioner diantarkan langsung kepada masing-masing responden dan dijemput langsung dalam rentang waktu 17 April sampai 9 Mei 2014.

Statistik Deskriptif

Sebelum dilakukan pengujian data secara statistik dengan lebih lanjut, terlebih dahulu dilakukan pendeskripsian terhadap variabel penelitian. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran tentang masing-masing variabel yang akan diteliti.

Tabel 1

Berdasarkan **Tabel 1 (lampiran)** diatas diketahui bahwa jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 57 orang auditor dari 145 auditor di BPKP perwakilan Sumatera Utara.

Untuk va-riabel kualitas audit tersebut diketahui memiliki rata-rata sebesar 4.0654 dengan standar deviasi 0.48097. untuk variabel skeptisme profesional memiliki nilai rata-rata sebesar 3.9449 dengan standar deviasi 0.58824. Untuk variabel kepatuhan pada kode etik memiliki nilai rata-rata sebesar 3.8509 dengan standar deviasi 0.44285. dan untuk variabel independensi memiliki nilai rata-rata sebesar 3.3099 dengan standar deviasi 0.52368.

Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian

1. Uji Validitas

Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner, digunakan *Corrected Item-Total Colleration*. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka data dikatakan valid. Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan bahwa nilai *Corrected Item-Total Colleration* untuk masing-masing item variabel X_1 , X_2 dan X_3 dinyatakan valid. **Tabel 2**

Berdasarkan **Tabel 2 (lampiran)** di atas dapat dilihat nilai dari *Corrected Item-Total Colle-ration* untuk masing-masing instrumen.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauhmana hasil penelitian tetap konsisten. Berikut ini merupakan tabel nilai *Cronbach's Alpha* masing-masing instrumen:

Tabel 3

Keandalan konsistensi antar item atau koefisien keandalan *Cronbach's Alpha* yang terdapat pada **tabel 3 (lampiran)** yaitu instrument variabel kualitas audit 0.894. Untuk instrument variabel skeptisme profesional 0.856. untuk instrument kepatuhan pada kode etik 0.962. dan untuk intrument variabel independensi 0.814. Dengan demikian semua instrument penelitian dapat dikatakan reliabel.

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas Residual

Uji normalitas dapat dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen dan variabel independen terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *one smplekolmogrov-smirnov test*, yang mana jika nilai *asympt.sig* (2-tailed) > 0,05 maka distribusi data dikatakan normal.

Tabel 4

Berdasarkan **Tabel 4 Hasil Uji Normalitas (lampiran)** terlihat bahwa hasil uji normalitas menunjukkan bahwa sig > 0,05 yaitu 0,607 yang berarti bahwa data terdistribusi secara normal

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya hubungan antara variabel-variabel bebas. Uji multikolinearitas diuji dengan *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *tolerance*. Apabila nilai *tolerance* > 0,1 dan VIF < 10 maka dikatakan tidak terdapat gejala multikolinearitas.

Tabel 5

Berdasarkan **Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas (lampiran)** terlihat bahwa nilai VIF untuk variabel X₁ skeptisme profesional sebesar 1,057 dan nilai *tolerance* sebesar 0,946. Untuk variabel X₂ kepatuhan pada kode etik memiliki nilai VIF sebesar 1,047 dan nilai *tolerance* sebesar 0,955. Sedangkan untuk variabel X₃ independensi memiliki nilai VIF sebesar 1,025 dan nilai *tolerance* sebesar 0,975. Masing-masing variabel terlihat memiliki nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* > 0,1 sehingga bisa dikatakan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian

residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk menguji terjadi atau tidaknya heterokedastisitas digunakan uji *Glejser*. Apabila nilai sig > 0,05 maka tidak terjadi gejala heterokedastisitas.

Tabel 6

Berdasarkan **Tabel 6 Hasil Uji Heterokedastisitas (lampiran)** terlihat bahwa hasil perhitungan masing-masing variabel menunjukkan bahwa level sig > 0,05 yaitu 0,157 untuk variabel skeptisme profesional, untuk variabel kepatuhan pada kode etik sebesar 0,275 dan variabel independensi sebesar 0,015. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bebas dari gejala heterokedastisitas dan layak untuk diteliti.

Hasil Uji Model

1. Koefisien Regresi Berganda

tolerance sebesar 0,998. Berdasarkan **Tabel 7 Hasil Uji Regresi Berganda (lampiran)** dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$KA = 0,504 + 0,542SP + 0,224KPKE + 0,1701 + e$$

Angka yang dihasilkan dalam pengujian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 0,504 yang berarti jika variabel independen yaitu skeptisme profesional, kepatuhan pada kode etik, dan independensi adalah nol j maka nilai kinerja auditor adalah sebesar konstanta 0,504.
- b. Nilai koefisien variabel skeptisme profesional sebesar 0,542. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan skeptisme profesional auditor sebesar satu satuan akan mengakibatkan kenaikan kualitas audit sebesar 0,542 satuan dengan asumsi variabel lain konstan.
- c. Nilai koefisien variabel kepatuhan pada kode etik sebesar 0,224. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan kepatuhan pada kode etik

sebesar satu satuan akan mengakibatkan kenaikan kualitas audit sebesar 0,224 dengan asumsi variabel lain konstan.

- d. Nilai Koefisien variabel independen sebesar 0,170. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan independensi sebesar satu satuan akan mengakibatkan kenaikan kualitas audit sebesar 0,170 dengan asumsi variabel konstan.

2. Uji F

Berdasarkan **Tabel 8 Hasil Uji F (lampiran)** dapat dilihat bahwa hasil uji F mempunyai signifikansi sebesar 0,00 dimana $\text{sig } 0,00 < 0,05$, hal ini berarti bahwa persamaan regresi yang diperoleh dapat diandalkan atau model yang digunakan sudah *fix*.

3. Koefisien Determinasi

Berdasarkan **Tabel 9 hasil uji Koefisien Determinasi (lampiran)** dapat dilihat besarnya Adjusted R Square adalah 0,569. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi variabel skeptisme profesional, kepatuhan pada kode etik, dan independensi terhadap variabel terikat yaitu kualitas audit pemerintah adalah sebesar 56,9%, sedangkan 46,9% ditentukan oleh faktor lain diluar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan cara membandingkan nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} . Nilai t_{tabel} dengan $\alpha = 0,05$ dan derajat bebas (db) = $n-k-1 = 57-3-1 = 53$ adalah 2,006.

Berdasarkan hasil analisis pada **Tabel 9 (lampiran)** maka dapat diketahui pengaruh antara variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen pada uraian berikut ini:

- 1) **Skeptisme Profesional (X_1) berpengaruh signifikan**

positif terhadap Kualitas Audit (Y)

Pengujian hipotesis pertama dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $\text{sig} < \alpha 0,05$. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar 0,00 $< \alpha 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 7,350 > t_{tabel} 2,006$. Nilai koefisien β dari variabel X_1 bernilai positif yaitu 0,542. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian sehingga **H_1 diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa skeptisme profesional berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit pemerintah.

2) **Kepatuhan Pada Kode Etik (X_2) berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Audit (Y)**

Pengujian hipotesis kedua dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $\text{sig} < \alpha 0,05$. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar 0,026 $< \alpha 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 2,293 > t_{tabel} 2,006$ dengan nilai koefisien β dari variabel X_2 yaitu 0,224. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian sehingga **H_2 diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pada kode etik berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit pemerintah.

3) **Independensi (X_3) berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Audit (Y)**

Pengujian hipotesis ketiga dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $\text{sig} < \alpha 0,05$. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar

$0,042 < \alpha 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 2,080 > t_{tabel} 2,006$ dengan nilai koefisien β dari variabel X_3 yaitu 0,170. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian sehingga **H₃ diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa independensi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit pemerintah.

A. Pembahasan

1. Pengaruh skeptisme profesional terhadap kualitas audit.

Penelitian ini menemukan data empiris bahwa skeptisme profesional berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit. Artinya, semakin tinggi skeptisme profesional maka akan semakin baik pula kualitas audit pemerintah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Miharni (2011) tentang pengaruh independensi, skeptisme profesional, dan bahan bukti yang kompeten terhadap kualitas audit ini menyatakan independensi, skeptisme profesional, dan bahan bukti yang kompeten berpengaruh positif terhadap kualitas audit pemerintah dan juga penelitian yang dilakukan oleh Putri (2011) tentang pengaruh etika, skeptisme profesional auditor, dan bahan bukti audit yang kompeten yang menyatakan etika, skeptisme profesional auditor, dan bahan bukti audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Penelitian ini sesuai dengan teori keagenan (*agency theory*). Teori keagenan merupakan bagian dari akuntansi keperilakuan (*behavioral accounting*) yang merupakan cabang akuntansi yang mempelajari hubungan antara perilaku manusia dengan sistem akuntansi. Ruang lingkup dibidang akuntansi keperilakuan sangat luas sekali, tidak hanya meliputi bidang akuntansi manajemen saja, tetapi juga menyangkut penelitian dalam bidang etika, auditing (pemeriksaan akuntan),

sistem informasi akuntansi bahkan juga akuntansi keuangan.

Penelitian ini, juga berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.Per/05/M.Pan/03/2008 tentang standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Implikasi pentingnya skeptisme profesional diterapkan, apabila seorang auditor yang memiliki skeptisme profesional yang tinggi maka dia tidak akan mudah terpengaruh dan tidak mudah dikendalikan oleh pihak lain dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpai saat pemeriksaan dan dalam merumuskan serta menyatakan pendapatnya. Seorang auditor harus memiliki sikap skeptisme profesional, dengan menerapkan sikap skeptisme profesional maka akan mempengaruhi tingkat pencapaian pelaksanaan suatu pekerjaan yang semakin baik atau dengan kata lain kinerjanya akan menjadi lebih baik dan memiliki skeptisme profesional yang tinggi maka akan mempengaruhi kualitas audit yang semakin baik pula.

Berdasarkan hasil penelitian juga dapat disimpulkan bahwa skeptisme profesional berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit pemerintah. Sehingga semakin tinggi skeptisme profesional maka semakin baik juga kualitas audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

2. Pengaruh kepatuhan pada kode etik terhadap Kualitas Audit.

Penelitian ini menemukan data empiris bahwa kepatuhan pada kode etik berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit. Artinya, semakin tinggi kepatuhan pada kode etik maka akan semakin baik pula kualitas audit pemerintahan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Subhan (2011)

tentang pengaruh kecermatan profesi, obyektivitas, independensi dan kepatuhan pada kode etik terhadap kualitas pemeriksaan. Hasil penelitian ini menunjukkan kecermatan profesi, obyektivitas, independensi dan kepatuhan pada kode etik berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas pemeriksaan. Dan juga penelitian yang dilakukan oleh Norma (2012) tentang pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi, hasil penelitian ini menunjukkan kompetensi dan independensi berpengaruh terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi.

Penelitian ini sesuai dengan teori keagenan (*agency theory*). Teori keagenan merupakan bagian dari akuntansi keperilakuan (*behavioral accounting*) yang merupakan cabang akuntansi yang mempelajari hubungan antara perilaku manusia dengan sistem akuntansi. Ruang lingkup dibidang akuntansi keperilakuan sangat luas sekali, tidak hanya meliputi bidang akuntansi manajemen saja, tetapi juga menyangkut penelitian dalam bidang etika, auditing (pemeriksaan akuntan), sistem informasi akuntansi bahkan juga akuntansi keuangan.

Disamping itu, tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana yang tercantum dalam menyatakan bahwa kepatuhan pada kode etik merupakan salah satu standar umum audit. Kode etik merupakan salah satu standar umum audit. Tanpa etik mengikat semua anggota profesi perlu ditetapkan bersama.

Implikasinya pentingnya kepatuhan pada kode etik diterapkan, apabila seorang auditor yang memiliki sikap kepatuhan terhadap kode etik yang tinggi maka akan membantunya

dalam bagaimana harus bersikap yang baik dan sesuai dengan kode etik yang ada. Seorang auditor harus memiliki sikap kepatuhan pada kode etik yang ada, dengan menerapkan sikap tersebut maka auditor akan mampu menjaga perilaku etisnya dan dapat memenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan audit. Semakin tinggi sikap kepatuhan pada kode etik auditor maka akan semakin tinggi juga kepercayaan masyarakat atas kualitas auditor yang dihasilkan. Hal ini sesuai dengan visi BPKP perwakilan Sumatera Utara yang ingin menjadi auditor presiden yang terpercaya.

Berdasarkan hasil penelitian juga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pada kode etik berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit pemerintah. Sehingga semakin tinggi sikap kepatuhan pada kode etik maka semakin baik juga kualitas audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

3. Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit.

Penelitian ini menemukan data empiris bahwa Independensi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit. Artinya, semakin tinggi independensi maka akan semakin baik pula kualitas audit pemerintahan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu (2013), tentang pengaruh keahlian, independensi, dan etika terhadap kualitas audit. Penelitian ini menyatakan keahlian, independensi, dan etika berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Dan juga hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2011) tentang pengaruh pengalaman kerja, obyektivitas, independensi dan integritas, kompetensi dan etika yang

menunjukkan bahwa pengalaman kerja, obyektivitas, independensi dan integritas, kompetensi dan etika berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit.

Penelitian ini sesuai dengan teori keagenan (*agency theory*). Teori keagenan merupakan bagian dari akuntansi keperilakuan (*behavioral accounting*) yang merupakan cabang akuntansi yang mempelajari hubungan antara perilaku manusia dengan sistem akuntansi. Ruang lingkup dibidang akuntansi keperilakuan sangat luas sekali, tidak hanya meliputi bidang akuntansi manajemen saja, tetapi juga menyangkut penelitian dalam bidang etika, auditing (pemeriksaan akuntan), sistem informasi akuntansi bahkan juga akuntansi keuangan.

Penelitian ini juga sejalan dengan yang dikemukakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tanggal 30 mei 2007 menyebutkan bahwa dalam semua hal yang berkaitan dengan audit, APIP harus independensi dan para auditornya harus obyektif dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam standar ini, bahwa independensi APIP serta obyektivitas auditor diperlukan agar kredibilitas hasil pekerjaan APIP meningkat.

Implikasi pentingnya independensi diterapkan, apabila seorang auditor yang memiliki sikap independensi yang tinggi maka auditor tersebut tidak akan mudah dipengaruhi oleh pihak manapun dan tidak memihak dalam melaksanakan pekerjaan sehingga dapat melaksanakan audit dengan baik pula. Seorang auditor harus memiliki sikap independensi yang tinggi, karena dengan menerapkan sikap tersebut maka auditor akan mampu menjaga kualitas laporan audit yang ada. Semakin tinggi sikap independensi

auditor maka akan semakin tinggi juga kepercayaan masyarakat atas kualitas auditor maka akan semakin akan semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan. Hal ini sesuai dengan visi BPKP perwakilan Sumatera Utara yang ingin menjadi auditor presiden yang terpercaya.

Berdasarkan hasil penelitian juga dapat disimpulkan bahwa independensi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit pemerintah. Sehingga semakin tinggi independensi maka semakin baik juga kualitas audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini mengenai Pengaruh skeptisme profesional, kepatuhan pada kode etik, dan independensi terhadap kualitas audit adalah sebagai berikut:

1. Skeptisme profesional auditor berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit pemerintah di BPKP perwakilan Sumatera Utara. Di mana, semakin baik skeptisme profesional maka akan semakin baik pula kualitas audit pemerintah.
2. Kepatuhan pada kode etik berpengaruh signifikan positif terhadap terhadap kualitas audit pemerintah di BPKP perwakilan Sumatera Utara. Di mana, semakin baik kepatuhan pada kode etik maka kualitas audit pemerintah akan semakin baik.
3. Independensi berpengaruh signifikan positif terhadap terhadap kualitas audit pemerintah di BPKP perwakilan Sumatera Utara. Di mana, semakin tinggi independensi auditor maka semakin baik kualitas audit yang dihasilkan auditor

pemerintah di BPKP perwakilan Sumatera Utara.

Keterbatasan Penelitian

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Dari hasil penelitian ini, besarnya Adjusted R Square rendah yaitu 0,569. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel skeptisme profesional, kepatuhan pada kode etik, dan independensi terhadap variabel terikat yaitu kualitas audit yaitu sebesar 56,9% dan 46,9% ditentukan oleh faktor lain.

2. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode survei menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara.

Saran

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Dari hasil penelitian ini, besarnya Adjusted R Square rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel skeptisme profesional, kepatuhan pada kode etik, dan independensi terhadap variabel terikat kualitas audit dipengaruhi oleh faktor lain yaitu integritas, obyektif, memiliki keahlian (latar belakang pendidikan, kompetensi teknis dan sertifikasi jabatan dan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan), kecermatan profesional, dan bahan bukti yang kompeten. Oleh karena itu jangan diteliti lagi.

2. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu pada metode penelitian yang dipakai. Untuk penelitian selanjutnya apabila menggunakan metode yang sama yaitu metode survei, hendaknya menambahkan wawancara. Wawancara secara langsung dilakukan terhadap auditor yang mengisi

kuesioner. Pertanyaan yang akan ditanyakan pada wawancara masih mengenai kuesioner yang diteliti yaitu dengan tujuan untuk mengkonfirmasi jawaban yang telah ada. Dengan demikian dapat menjamin dan mempertajam data yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Aren, Alvins A., Randal J. Elder dan Mark S. Beasley. 2008. *Auditing dan jasa assurance*. Jakarta: Erlangga.

Ayu, dewi. 2013. Pengaruh Keahlian, Independensi, dan Etika Terhadap Kualitas Audit. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. 2007. Peraturan Badan Pemriksaan Keuangan Republik Indonesia No. 01 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. (<http://www.google.com>)

Cooper, Donal R. dan Emory C. William. 1999. *Metode Penelitian Bisnis*. jilid 2. Alih Bahasa oleh Widyono Soetjipto. Jakarta: Erlangga.

Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Detik, News. 2013. *Kasus auditor BPKP terima suap dari Kemendikbud*. (<http://google.com>)

Elya Wati, Lismawati, dan Nila Aprilla. 2010. Pengaruh Independensi, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi, dan Pemahaman Good Governance Terhadap Kinerja Auditor Pemerintah. Simposium Nasionak Akuntansi XIII Purwokerto.

Firdaus. (2005). *Auditing, Pendekatan Pemahaman Secara Komprehensif*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Guy, Dan M, C. Wayne Aldermer, dan Alan J Winter. 2002. *Auditing*. Terjemahan Sugiyarto. Jakarta: Erlangga.

Havidz Mabruhi dan Jaka Winarna. 2010. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit di Lingkungan Pemerintah Daerah. Simposium Nasionak Akuntansi XIII Purwokerto.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2001. *Standar Profesi Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat

Kompas. 2013. *Kasus gagal audit BPKP*. (<http://google.com>)

Miharni, Haviz. 2011. Pengaruh Independensi, Skeptisme Profesional, dan Bahan Bukti Audit yang Kompeten Terhadap Kualitas Audit. Skripsi. Universitas Negeri Padang.

Medan, Tribunnews. 2013. Sudirman Akan Buka-Bukaan Terkait BPKP dan Kejatisu. (<http://google.com>).

Mulyadi. 2002. *Auditing*. Edisi Keenam. Jakarta: Salemba Empat

Norma, Kharismatuti. 2012. Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi. Semarang: Universitas Diponegoro.

Nur Samsi, Akhmad Riduwan dan Bambang Suryono. 2013. Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, dan Kompetensi Terhadap Kualitas Audit: Etika Auditor Sebagai Variabel Pemoderasi. Jurnal dan Riset Akuntansi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri. No. 28. 2007. Tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah

Putri, Yanti. 2011. Pengaruh Etika, Skeptisme Profesional Auditor, dan Bahan Bukti Audit yang Kompeten Terhadap

Kualitas Audit. Skripsi. *Universitas Negeri Padang*

Pusdiklat BPKP.2008. www.bpkp.go.id.

Rr Putri, Ariska Nirmala, dan Nurcahyonowati. 2013. Pengaruh Independensi, Pengalaman, Due Professional Care, Akuntabilitas, Kompleksitas Audit, dan Time Budget Perssure Terhadap Kualitas Audit. *Diponegoro Journal Of Accounting*

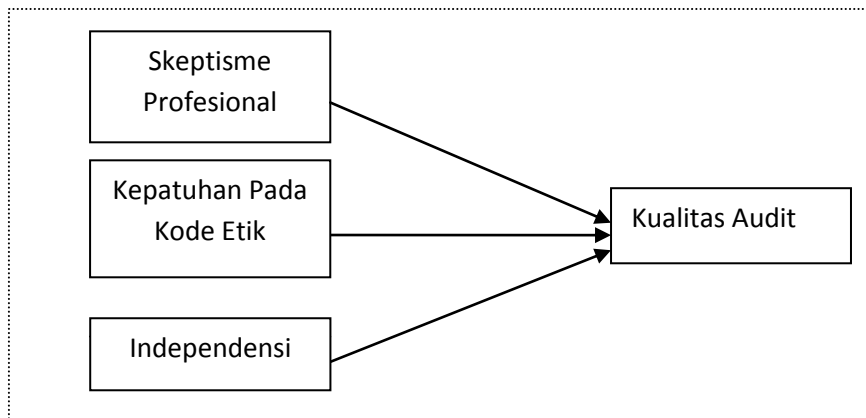
Sukrisno Agoes. 2004. Auditing (*pemeriksaan*) oleh Kantor Akuntan Publik. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Sari, Nughy Nuralita. 2011. Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Objektivitas, Integritas, Kompetensi Dan Etika Terhadap Kualitas Audit. Skripsi. Semarang: *Universitas Diponegoro*.

Subhan. 2011. Pengaruh Kecermatan Profesi, Obyetifitas, Independensi dan Kepatuhan Pada Kode Etik Terhadap Kualitas Pemeriksaan. Madura : *Universitas Madura*.

Lampiran

Gambar 1



Tabel 1: Stasistik Deskriptif

Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
Kualitas_audit	4.0654	.48097	57
Skeptisme_Profesional	3.9449	.58824	57
Kode_Etik	3.8509	.44285	57
Independensi	3.3099	.52368	57

Tabel 2: Uji Validitas

Uji Validitas

Variabel Y	r _{hitung}	Ket	Variabel X1	r _{hitung}	Ket	Variabel X2	r _{hitung}	Ket	Variabel X3	r _{hitung}	Ket
Q1	.454	Valid	Q1	.587	Valid	Q1	.902	Valid	Q1	.644	Valid
Q2	.540	Valid	Q2	.675	Valid	Q2	.915	Valid	Q2	.568	Valid
Q3	.463	Valid	Q3	.831	Valid	Q3	.915	Valid	Q3	.530	Valid
Q4	.853	Valid	Q4	.749	Valid	Q4	.902	Valid	Q4	.710	Valid
Q5	.766	Valid	Q5	.394	Valid				Q5	.520	Valid
Q6	.702	Valid	Q6	.331	Valid				Q6	.500	Valid
Q7	.644	Valid	Q7	.837	Valid						
Q8	.826	Valid									
Q9	.826	Valid									
Q10	.552	Valid									
Q11	.540	Valid									

Tabel 3: Uji Reliabilitas

Nilai Cronbach's Alpha

Variabel	Nilai Cronbach's Alpha
Kualitas Audit (Y)	0,894
Skeptisme Profesional (X ₁)	0,856
Kepatuhan Pada Kode Etik (X ₂)	0,962
Independensi (X ₃)	0,814

Tabel 4: Uji Normalitas

Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		57
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.30720772
Most Extreme Differences	Absolute	.101
	Positive	.080
	Negative	-.101
Kolmogorov-Smirnov Z		.762
Asymp. Sig. (2-tailed)		.607

Tabel 5: Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.504	.505		.998	.323		
Skeptisme_Profesional	.542	.074	.663	7.350	.000	.946	1.057
Kepatuhan pada kode Etik	.224	.097	.206	2.293	.026	.955	1.047
Independensi	.170	.082	.185	2.080	.042	.975	1.025

Tabel 6: Uji Heterokedastisitas**Uji Heterokedastisitas****Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.732	.318		-2.301	.025
Skeptisme Profesional	.067	.047	.185	1.437	.157
Kepatuhan Pada Kode Etik	.068	.061	.141	1.102	.275
Independensi	.129	.051	.318	2.510	.015

Tabel 7: Uji Koefisien Regresi Berganda**Koefisien Regresi Berganda****Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1(Constant)	.504	.505		.998	.323
Skeptisme_Profesional	.542	.074	.663	7.350	.000
Kode_Etik	.224	.097	.206	2.293	.026
Independensi	.170	.082	.185	2.080	.042

Tabel 8: Uji F**Uji F**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	7.670	3	2.557	25.637	.000 ^a
Residual	5.285	53	.100		
Total	12.955	56			

Tabel 9: Uji Koefisien Determinasi**Koefisien Determinasi
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.769 ^a	.592	.569	.31578